

Kurikulum Antikorupsi Miliki Peran Strategis

YOGYAKARTA - Perguruan tinggi dinilai memiliki peran strategis dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi. Salah satu contoh nyata yang bisa dilakukan perguruan tinggi adalah dengan implementasi kurikulum anti-korupsi.

"Perguruan tinggi memiliki sumber daya manusia (SDM) yang memadai, yang jika dimaksimalkan dengan baik, akan berperan signifikan dalam pemberantasan korupsi. Untuk itu, perguruan tinggi dapat berperan dengan menerapkan kurikulum anti-korupsi," kata dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Dr Zulkifli Aspan SH MH di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dalam acara Anti Corruption Summit II yang diadakan Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) bekerja sama dengan Fakultas Hukum UMY dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kemarin.

Zulkifli mengatakan, penerapan kurikulum antikorupsi oleh perguruan tinggi bertujuan untuk menyelamatkan negara dari dampak negatif korupsi. Saat ini kurikulum tersebut telah diterapkannya di Universitas Hasanuddin, Makassar.

"Kurikulum antikorupsi tidak hanya memuat mata kuliah antikorupsi yang selama ini diajarkan di fakultas hukum, tapi juga dibantu dengan berdirinya Klinik Anti Korupsi.

Ke depannya, kurikulum antikorupsi ini tidak hanya diterapkan di fakultas hukum, juga diterapkan di semua fakultas. Sebab, isu korupsi juga berkaitan dengan ilmu lainnya," kata Zulkifli.

Menurut Zulkifli, mahasiswa lintas fakultas perlu diberikan pemahaman tentang

isu antikorupsi, pencegahan, dan penindakannya.

Zulkifli mengusulkan perlu ada pembentukan protokol antikorupsi yang diberlakukan di internal perguruan tinggi.

"Protokol antikorupsi ini menjadi pedoman yang mengikat secara internal terhadap tiap kegiatan dan kebutuhan perguruan tinggi. Termasuk pengadaan barang dan jasa di universitas yang rentan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme," kata Zulkifli.

Sementara itu, dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Aflah Lubis SH MHum mengatakan, generasi muda Indonesia harus dibangkitkan semangatnya dalam memberantas tindak pidana korupsi. Hal ini karena generasi muda juga bagian dari masyarakat Indonesia yang wajib berperan aktif dalam pemberantasan korupsi di negeri ini.

"Untuk itu, pendidikan dini sangat penting dalam pencegahan tindak pidana korupsi. Karena pendidikan merupakan salah satu penuntun generasi muda ke jalan yang benar.

Pendidikan berperan sebagai awal pencetak pemikir besar. Bisa jadi, pendidikan menjadi aspek awal yang dapat mengubah seseorang menjadi koruptor atau tidak," kata Aflah.

Aflah menegaskan dukungannya agar perguruan tinggi bisa lebih berperan dalam upaya mendidik generasi muda bangsa untuk menghindari dan memberantas tindak pidana korupsi.

Menurut Aflah, pendidikan menjadi salah satu tonggak kehidupan masyarakat demokrasi yang maddani. Jadi, sudah sepantasnya pendidikan mempunyai andil dalam hal pencegahan korupsi.